



LAKIP

2025

Disusun oleh:
perencanaan & pelaporan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dapat diselesaikan dengan baik.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 merupakan iktisar akuntabilitas yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

Tidak lupa ucapan terima kasi kami haturkan kepada seluruh pegawai dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP tahun 2025 ini. Harapan kami semoga dokumen LKjIP tahun 2025 dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, dan LKjIP tahun 2025 ini juga dapat menjadi acuan yang bermfaat dalam rangka penyempurnaan dokumen perencanaan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah pada tahun yang akan datang

Menyadari akan kelemahan dan kekurangan atas muatan dokumen LKjIP ini, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Masohi, Pebruari 2026

Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Maluku Tengah,


CHORNELES SOPARUE, S.Pi, M.Si

NIP. 19730517 199903 1008

Ringkasan Eksekutif

Untuk membantu Bupati Maluku Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Persandian

Pembangunan Kabupaten Maluku Tengah terus mengalami peningkatan terutama pada aktivitas layanan. Dinamika dari era digital ini juga telah menyebabkan terjadinya cara baru yang memanfaatkan perubahan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi.

Dalam rangka memperkuat ekonomi daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika fokus pada reformasi kebijakan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terutama yang terkait dengan DNA (Device / perangkat, Network / jaringan, Application / aplikasi). Hasil capaian pelaksanaan program-program tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Kemkominfo.

Selain membuat kebijakan sektor TIK, Dinkominfo juga melaksanakan fungsi edukasi dalam melaksanakan program kebijakan untuk pengelolaan media informasi di daerah. Selain itu, juga berperan sebagai Government Public Relations dalam mendiseminasikan program-program pemerintah daerah dengan menyajikan informasi resmi dan akurat dari lintas sektor pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mudah memahami program-program pemerintah tersebut beserta hasil-hasilnya.

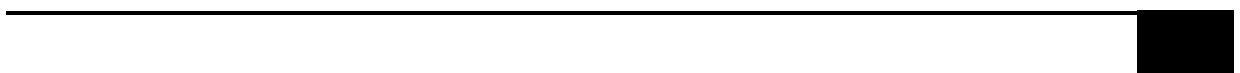
Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinkominfo Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi perwujudan dari upaya Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan menjadi media komunikasi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui laporan kinerja ini pula, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi peningkatan kinerja di lingkungan internal Dinkominfo.



Pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah sebagai Jendela Indonesia Bagian Timur dengan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis yang ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Diskominfo Tahun 2025 yang merupakan implementasi dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam menjawab Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bupati Maluku Tengah sebagaimana di Amanatkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Maluku Tengah 2025-2029. Laporan Kinerja Diskominfo Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang diperjanjikan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada para pimpinan dan stakeholders selama Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029 serta dokumen perencanaan turunannya.

Perjanjian Kinerja ini ditetapkan kedalam 1 (satu) Tujuan dengan 1 (satu) Indikator Tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja Sasaran. Ikhtisar hasil evaluasi capaian kinerja tersebut diuraikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut:



Tabel 1.1. Ikhtisar Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Analisis dan Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	%	6,00	6,40	106,67	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6.00% dan Realisasinya mencapai 6,40% atau sebesar 106,675% dengan implementasi SANGAT BAIK	SANGAT MEMUASKAN

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Analisis dan Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	16,25	19,88	122,34	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 16,25% dan Realisasinya mencapai 19,88% atau sebesar 122.34 % dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	2,38	2,24	94,12	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2.38% dan Realisasinya mencapai 2.24% atau sebesar 94.12% dengan Interpretasi SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	12,20	13,21	108,28	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 12,20% dan Realisasinya mencapai 13,21% atau sebesar 108,28% dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN
		Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	%	50,00	16,67	33,34	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% dan Realisasinya mencapai 16.67% atau sebesar 33,34% dengan Interpretasi KURANG, dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	SANGAT RENDAH
	Sasaran 2 : Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	0	0	0	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 belum ditargetkan dan akan di Realisasikan pada tahun 2026	
	Sasaran 3 : Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	%	75	78,85	105,13	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 ditargetkan sebesar B dan Realisasinya mencapai BB atau sebesar 105,133 dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

Kinerja Anggaran Tahun 2025

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kominfo dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target Renja Tahun 2025 terlihat dari Realisasi Belanja Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.749.697.835,- atau 96,41% dari Pagu DPA sebesar Rp. 4.926.369.450,- Dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai 2.482.255.771,- atau 96,88% dari pagu Rp. 2.562.107.950,- Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.223.264.064,- atau 95,97% dari pagu anggaran Rp.2.316.561.500,- dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.44.178.000 atau atau 92,62% dari pagu sebesar Rp. 47.700.000,-

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

KODE	URAIAN BELANJA	2025			2024
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
5,1	BELANJA OPERASIONAL	4.878.668.950	4.705.519.835	96,45	4.568.084.512
5.1.01	Belanja Pegawai	2.562.107.950	2.482.255.771	96,88	2.650.483.003
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.561.000	2.223.264.064	95,97	1.917.601.509
5.2.	Belanja Modal	47.700.000	44.178.000	92,62	147.615.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.700.000	44.178.000	92,62	147.615.000
	Belanja Daerah	4.926.368.950	4.749.697.835	96,41	4.715.699.512

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksklusif.....	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Kedudukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
1.4. Sumber Daya Manusia.....	7
1.5. Tatalaksana Organisasi.....	7
1.6. Permasalahan.....	14
1.7. Isu Strategi.....	16
1.8. Landasan Hukum	18
1.9. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangla Menengah PD.....	21
2.2. Strategi dan Kebijakan.....	24
2.3. Struktur Program dan Kegiatan.....	27
2.4. Perjanjian Kinerja.....	25
2.5. Rencana Kerja Tahunan.....	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	34
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	42
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	43
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional	45

3.1.5	Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan	46
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	50
3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian pernyataan kinerja	52
B.	Realisasi Anggaran	53
3.2.	Efisiensi Anggaran.....	53
BAB IV	PENUTUP.....	58
4.1.	Simpulan Umum.....	58
4.2.	Rekomendasi.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka terwujudnya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap organisasi publik saat ini diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2026.

Berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.

SAKIP dikembangkan secara integrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan dan sistem akuntabilitas pemerintahan. Substansi dari SAKIP pada intinya adalah penyelarasan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan orientasi kepada hasil. Proses penyelarasan ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja. Renstra memberikan arah

pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Maksud dan Tujuan.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Maluku Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama Tahun 2025.

Sedangkan Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kabupaten Maluku Tengah. Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yakni berikut :

1. STRATEGI.

Memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2025-2030, maka strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut;

- a. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan layanan TIK di seluruh wilayah.
- b. Membangun sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis SPBE.
- c. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral secara terpadu.
- d. Meningkatkan kualitas komunikasi publik yang partisipatif dan inklusif.
- e. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK dan komunikasi.
- f. Membangun sistem keamanan informasi dan persandian yang andal.

- g. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
- h. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Diskominfo.

2. ARAH KEBIJAKAN.

Adapun arah kebijakan pelaksanaan dari strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan internet hingga desa dan pulau-pulau kecil
- b. Terlaksananya Optimalisasi kerja sama dengan BUMN/penyedia layanan
- c. Terlaksananya Pemetaan wilayah blank spot dan penyusunan roadmap pengembangan TIK
- d. Terlaksananya Penerapan arsitektur SPBE di seluruh OPD
- e. Terlaksananya Integrasi aplikasi layanan publik antar-perangkat daerah
- f. Terlaksananya Pengembangan dashboard layanan terintegrasi
- g. Terlaksananya Penguatan implementasi Satu Data Indonesia
- h. Terlaksananya Penyusunan metadata dan pemutakhiran data sektoral
- i. Terlaksananya Penguatan koordinasi walidata, produsen data, dan pembina data
- j. Terlaksananya Penguatan peran kehumasan pemerintah daerah
- k. Terlaksananya Optimalisasi kanal komunikasi digital (web, media sosial, radio)
- l. Terlaksananya Kampanye publik secara berkala terkait isu strategis pembangunan
- m. Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi teknis bagi ASN pengelola TIK dan PPID
- n. Terlaksananya Pembentukan unit layanan digital internal di OPD strategis
- o. Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi
- p. Terlaksananya Pengembangan kebijakan keamanan informasi daerah
- q. Terlaksananya Implementasi standar keamanan TIK (firewall, enkripsi, backup)
- r. Terlaksananya Pelatihan keamanan siber untuk ASN
- s. Terlaksananya Sosialisasi literasi digital di sekolah, desa, dan komunitas
- t. Terlaksananya Pengembangan konten edukatif digital berbasis lokal
- u. Terlaksananya Sinergi dengan BUMN dan komunitas digital untuk pelatihan publik
- v. Terlaksananya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya administrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah
- w. Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah.
- x. Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional.

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025-2030

y.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Dinas
1	2	3	4	5
(Tujuan 3) Mewujudkan Pembangunan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif				
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi Publik serta Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	1.1. Meningkatkan pemerataan pemerataan infrastruktur dan layanan TIK di seluruh wilayah	1.1.1 Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan internet hingga desa dan pulau-pulau kecil	1.1.1.1 Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet memadai
			1.1.2 Terlaksananya Optimalisasi kerja sama dengan BUMN/penyedia layanan	1.1.1.2 Jumlah titik layanan publik yang terhubung ke jaringan TIK
			1.1.3 Terlaksananya Pemetaan wilayah blank spot dan penyusunan roadmap pengembangan TIK	1.1.1.3 Penurunan jumlah wilayah blank spot komunikasi
		1.2. Membangun sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis SPBE	1.2.1 Terlaksananya Penerapan arsitektur SPBE di seluruh OPD	1.2.1.1 Persentase aplikasi layanan yang terintegrasi antar-OPD
			1.2.2 Terlaksananya Integrasi aplikasi layanan publik antar-perangkat daerah	1.2.1.2 Nilai indeks SPBE Kabupaten Maluku Tengah
			1.2.3 Terlaksananya Pengembangan dashboard layanan terintegrasi	1.2.1.3 Jumlah layanan digital berbasis satu pintu
		1.3. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral secara terpadu	1.3.1 Terlaksananya Penguatan implementasi Satu Data Indonesia	1.3.1.1 Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memperbarui metadata
			1.3.2 Terlaksananya Penyusunan metadata dan pemutakhiran data sektoral	1.3.1.2 Jumlah data sektoral yang tersedia dan digunakan untuk perencanaan
			1.3.3 Terlaksananya Penguatan koordinasi walidata, produsen data, dan pembina data	1.3.1.3 Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap mekanisme satu data
		1.4. Meningkatkan kualitas komunikasi publik yang partisipatif dan inklusif	1.4.1 Terlaksananya Penguatan peran kehumasan pemerintah daerah	1.4.1.1 Persentase masyarakat yang mengakses informasi resmi pemerintah
			1.4.1 Terlaksananya Optimalisasi kanal komunikasi digital (web, media sosial, radio)	1.4.1.2 Jumlah konten informasi publik yang diproduksi dan disebarluaskan
			1.4.1 Terlaksananya Kampanye publik secara berkala terkait isu strategis Pembangunan	1.4.1.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik
		1.5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK dan komunikasi	1.5.1 Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi teknis bagi ASN pengelola TIK dan PPID	1.5.1.1 Jumlah SDM bersertifikat di bidang TIK dan informasi publik
			1.5.2 Terlaksananya Pembentukan unit layanan digital internal di OPD strategis	1.5.1.2 Jumlah pelatihan/lokakarya yang dilaksanakan per tahun
	1.5.3 Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi		1.5.1.3 Persentase OPD dengan unit pengelola layanan digital	
	1.6. Membangun sistem keamanan informasi dan persandian yang andal	1.6.1 Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1.6.1.1 Jumlah insiden kebocoran data/sistem yang tertangani	
		1.6.2 Terlaksananya Implementasi standar keamanan TIK (firewall, enkripsi, backup)	1.6.1.2 Jumlah OPD yang menerapkan protokol keamanan informasi	
		1.6.3 Tersedianya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1.6.1.3 Tingkat kepatuhan terhadap SOP keamanan informasi	
	1.7. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pendampingan	1.7.1 Terlaksananya Sosialisasi literasi digital di sekolah, desa, dan komunitas	1.7.1.1 Jumlah kegiatan literasi digital per tahun	
		1.7.2 Terlaksananya Pengembangan konten edukatif digital berbasis local	1.7.1.2 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program literasi digital	
		1.7.3 Terlaksananya Sinergi dengan BUMN dan komunitas digital untuk pelatihan public	1.7.1.3 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat terhadap layanan digital pemerintah	
2. Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	2.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Diskominfo	2.1.1 Terlaksananya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya administrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah	2.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		2.1.2 Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah	2.1.2.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang kinerja Perangkat Daerah	
		2.1.3 Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional	2.1.3.1 Jumlah sumber daya aparatur yang profesional	

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika

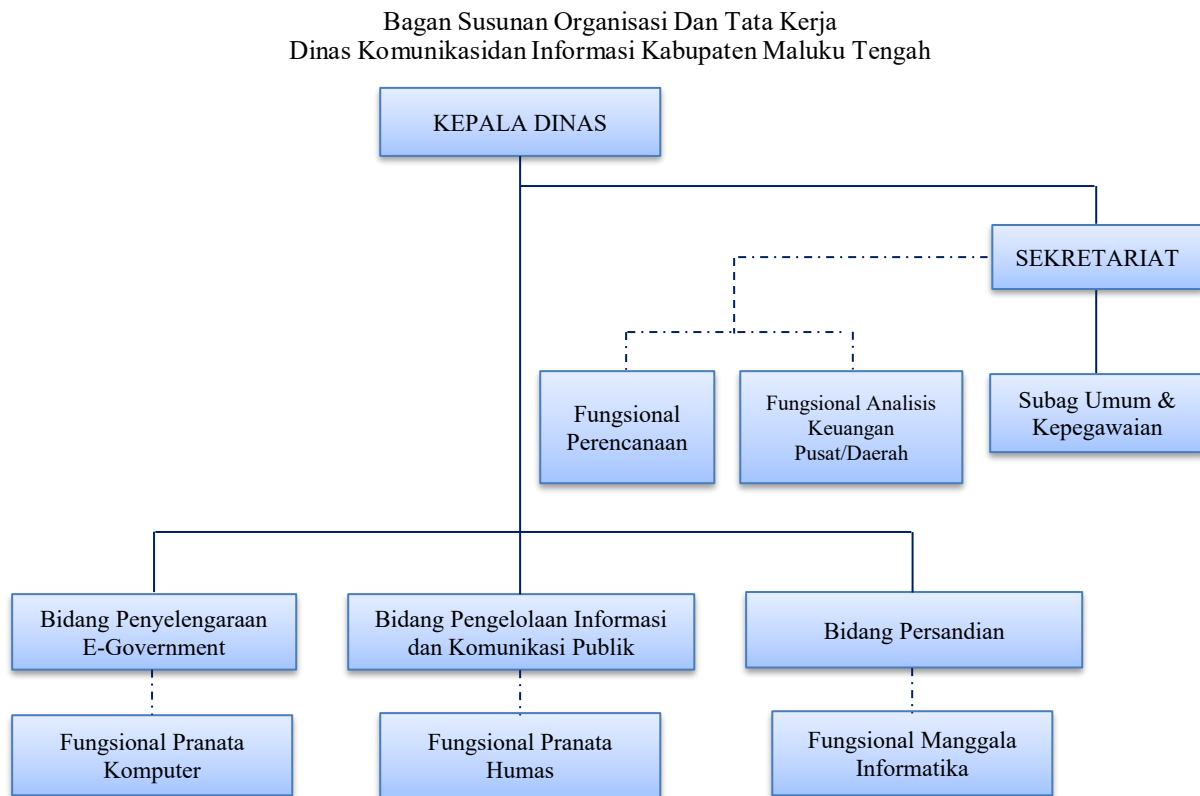
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Maluku Tengah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang mempunyai tugas pokok sebagai penyelenggara kewenangan/ melaksanakan urusan pemerintahan daerah meliputi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang persandian. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, bahwa dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- d) Pelaksanaan administrasi Bidang Komunikasi dan Informatika;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun susunan organisasinya Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dan Analisa Keuangan
- 3) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Humas
- 4) Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer
- 5) Bidang Persandian membawahi:
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional Manggala Informatika

Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, diperlihatkan dalam bagan beriku ini:



Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang komunikasi dan informatika dengan mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan optimal;
- b) Sekretarias mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis administrasi untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi menghimpun, mengkoordinasikan, memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas dengan merencanakan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
- c) Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Pengolahan Informasi dan Komunkasi Publik dan Hubungan Media dan melaksanakan fungsi dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

menyiapkan, membagi tugas, memberikan dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;

- d) Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan E-Government dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, menyiapkan, melaksanakan, membagi tugas, memberikan dan melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu;
- e) Bidang Persandian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas di Bidang Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian dan Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Persandian dengan menghimpun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, menyiapkan, melaksanakan, membagi tugas, memberikan, melaporkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal dan tepat waktu.

D. Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 33 ASN dan Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Tata Laksana Dinas Komunikasi Dan Informatika

a). Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu:

- 1) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- 2) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- 3) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- 4) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- 5) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- 6) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- 7) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- 8) Akuntabilitas Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target yang ditetapkan.

b). Tata Kerja

- 1) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- 4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- 6) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati;
- 7) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

c). Prosedur Kerja Dinas: Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Fungsional Perencanaan dan Pelaporan

Fungsional Perencanaan dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas serta penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan dan perlengkapan.

Fungsional Analisi Keuangan Pusat/Daerah

Fungsional Analisi Keuangan Pusat/Daerah bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, sistem akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan pembendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan dan perlengkapan.

Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang prasarana dan sarana penghubung, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang prasarana dan sarana, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Humas.

Fungsional Pranata Humas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Kelembagaan Usaha Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengolahan Informasi dan Komunikasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, meliputi : penyusunan program dan kegiatan seksi, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media, menyusun potensi dan permasalahan lingkup seksi, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan kegiatan seksi, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi bidang komunikasi dan informatika, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Penyelenggaraan E-Government

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan E- Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Penyelenggaraan E-Government, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan :

1. Infrastruktur dan Teknologi, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberiab bimbingan teknis dan supervise di bidang Infrastruktur dan Teknologi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Infrastruktur dan Teknologi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

2. Layanan E-Government meliputi : penyusunan rencana kegiatan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberi bimbingan teknis dan supervise di bidang Layanan E-Government, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Layanan E-Government, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Persandian

Kepala Bidang Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembinaan Kelembagaan usaha Penyelenggaraan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Persandian, potensi dan permasalahan bidang, kebijakan teknis, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi kepada masyarakat, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Fungsional Manggala Komputer

Fungsional Manggala Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan

1. Tata Kelola dan Operasional Pengamanan Persandian, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, pengolahan proses pengamanan informasi milik daerah, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan, dan penghacuran informasi berkalsifikasi, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.
2. Pengawasan dan Evaluasi Penyelnggaran Persandian, meliputi: penyusunan rencana kegiatan, penyiapan instrument, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 39 ASN dan 6 Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika:

Tabel 1.1
Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2025

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	Struktural
2	Sekretaris	1	Struktural
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	Struktural
4	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	1	Struktural
5	Kepala Bidang Penyelenggaraan Persandian	1	Struktural
6	Kasubag Umum/Kepegawaian	1	Struktural
7	Perencana Ahli Muda	1	Fungsional
8	Analisis Keuangan Pusat /Daerah	1	Fungsional
9	Manggala Informatika	2	Fungsional
10	Pranata Komputer	2	Fungsional
11	Bendahara Pengeluaran	1	Pelaksana
12	Analisi Perencana, Evaluasi dan Pelaporan	1	Pelaksana
13	Pengelola Informasi dan Komunikasi	2	Pelaksana
14	Pranata TIK	3	Pelaksana
15	Operator Komputer grafis	1	Pelaksana
16	Operator sandi dan Komunikasi	1	Pelaksana
17	Pengelola Data Aplikasi Sistem Keuangan	1	Pelaksana
18	Pengelola Barang Milik Negara	1	Pelaksana
19	Analisis Persandian	1	Pelaksana
20	Operator Komunikasi	1	Pelaksana
21	Operator Layanan Operasional	4	Pelaksana
22	Pengadministrasi Keuangan	1	Pelaksana
23	Pengadministrasi Umum	2	Pelaksana
24	Pranata Humas	2	Pelaksana
25	Pranata Layanan Operasional	2	Pelaksana
26	Arsiparis	3	Pelaksana
27	Arsiparis Terampil	1	Pelaksana
	Jumlah	40	

Tabel 1.2
Jumlah ASN/P3K Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2025

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Tingkat I	IV/b	2
2	Pembina	IV/a	4
3	Penata Tingkat I	III/d	4
4	Penata	III/c	4
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
6	Penata Muda	III/a	6
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	1
9	PPPK	IX	9
10	PPPK	VII	1
11	PPPK	V	3
12	PPPK	PW	2
	T o t a l		40

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2025

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SMA/SMK	9	ASN
2	D3	3	ASN
3	S1	9	ASN
4	S2	4	ASN
5	SMA/SMK	5	PPPK
6	D3	1	PPPK
7	S1	9	PPPK
	T o t a l	40	

E. PERMASALAHAN

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah serta setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu: “Belum Optimalnya Implementasi Keterbukaan informasi Publik dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mendukung Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut: Sebagai perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dihadapkan pada sejumlah permasalahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Permasalahan-permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Adapun permasalahan pelayanan yang menonjol adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Cakupan dan Kualitas Jaringan Komunikasi

Sebagian wilayah di Kabupaten Maluku Tengah, terutama daerah terpencil dan kepulauan, belum sepenuhnya terlayani oleh jaringan internet dan telekomunikasi yang stabil dan cepat. Kondisi geografis yang menantang menyebabkan kesenjangan layanan komunikasi antara wilayah daratan dan pulau-pulau kecil, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan pelayanan digital secara merata.

2. Belum Optimalnya Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik melalui media resmi pemerintah, website, dan media sosial belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Informasi yang disampaikan belum konsisten, tidak selalu terkini, dan masih belum menjangkau semua kalangan, khususnya masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Selain itu, kapasitas pengelolaan kehumasan dan PPID di perangkat daerah juga masih bervariasi.

3. Keterbatasan Pelayanan Data dan Statistik Sektoral

Dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis data, Dinas Kominfo berperan dalam layanan statistik sektoral dan koordinasi satu data daerah. Namun hingga kini, integrasi data antar-OPD belum berjalan optimal, banyak data yang tidak mutakhir, serta minimnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Hal ini menjadi hambatan dalam pelayanan data yang akurat dan dapat dipercaya.

4. Pelayanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektornik Daerah Belum Terstandar dan Terintegrasi

Masih terdapat banyak aplikasi pelayanan publik dan sistem informasi OPD yang dikembangkan secara terpisah (parsial), tanpa integrasi dan interoperabilitas yang memadai. Hal ini menyebabkan duplikasi layanan, ketidakefisienan, serta kesulitan dalam berbagi pakai data antar-instansi. Akibatnya, pelayanan kepada masyarakat dan internal pemerintah belum berjalan secara optimal.

5. Kualitas Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Belum Memadai

Dalam aspek perlindungan data dan informasi strategis, pelayanan persandian dan keamanan informasi masih memiliki keterbatasan dalam hal perangkat, infrastruktur, dan kesiapan SDM. Ancaman terhadap keamanan siber seperti peretasan, penyebaran hoaks, dan kebocoran data menjadi tantangan serius yang belum sepenuhnya dapat diantisipasi oleh sistem yang ada.

6. Pelayanan Literasi Digital dan Edukasi Publik Masih Terbatas

Upaya Dinas Kominfo dalam memberikan layanan literasi digital kepada masyarakat, terutama dalam penggunaan layanan daring pemerintah, masih kurang optimal. Kegiatan edukasi yang bersifat inklusif dan menjangkau masyarakat akar rumput, seperti pelajar, UMKM, dan komunitas lokal, masih bersifat sporadis dan belum terjadwal secara sistematis.

7. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan

Pelayanan yang diberikan Dinas Kominfo masih terkendala oleh keterbatasan sarana penunjang seperti perangkat server, pusat data (data center), perangkat komunikasi, dan sistem backup informasi. Hal ini menyebabkan layanan TIK dan komunikasi publik belum berjalan dengan andal dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Permasalahan pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah bersumber dari keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola data, hingga minimnya jangkauan informasi kepada publik. Untuk menjawab permasalahan ini, diperlukan strategi penguatan layanan berbasis digital yang inklusif, integratif, dan berkelanjutan, dengan dukungan anggaran, kerja sama lintas sektor, serta peningkatan kapasitas teknis secara berkelanjutan.

G. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Visi Indonesia Emas 2045 dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan yang diterjemahkan kedalam lima sasaran utama dan 17 Arah (Tujuan), 8 Misi (Agenda) dan 45 Indikator Utama Pembangunan salah satunya adalah Transformasi Digital.

RPJMN 2025-2029 adalah tahapan pertama dalam RPJPN 2025-2045 dimana menjadi tahap awal transformasi Indonesia melalui Perkuatan Fondasi Transformasi. Indonesia akan menghadapi Mega Trend 2045 dimana teknologi akan menggantikan 40% pekerjaan eksisting yang ada saat ini. Perkembangan Artificial Intelligence, Internet of things, big data, data science dan cyber security adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari di masa depan. Sehingga membangun ekosistem transformasi digital menjadi keharusan sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada lingkungan eksternal, pelayanan publik berbasis digital yang lebih baik, strategi mengatasi ancaman keamanan siber dan pengambilan keputusan Pemerintah yang lebih tepat sasaran berbasis data.

Visi Indonesia Digital mencerminkan upaya pemerintah untuk menjadikan teknologi digital sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, dengan fokus pada inklusi digital, pembangunan ekonomi berbasis teknologi, dan peningkatankualitas hidup masyarakat. Transformasi digital akan mencakup berbagai aspek (pengembangan teknologi, penguatan infrastruktur digital, pengembangan SDM dan peningkatan literasi digital) untuk meningkatkan efisiensi, layanan publik, keamanan siber, pemanfaatan data dan mendukung pembangunan sektor informasi dan komunikasi, data statistik serta persandian dan keamanan informasi.

Adapun beberapa isu strategis nasional yang akan ditindaklanjuti dalam rangka mendukung transformasi digital di Kabupaten Maluku Tengah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi serta mempertimbangkan kondisi geografis, kemampuan sumber daya, perkembangan teknologi, dan arah kebijakan nasional, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah merumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Kesenjangan Akses dan Kualitas Layanan TIK Antarwilayah

Wilayah kepulauan dan terpencil di Kabupaten Maluku Tengah masih mengalami keterbatasan akses jaringan internet dan komunikasi. Kesenjangan digital ini menghambat pemerataan pelayanan publik berbasis elektronik dan memperbesar ketimpangan pembangunan antar kawasan

Isu Strategis:

Memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur TIK secara merata di seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan tertinggal

2. Rendahnya Integrasi dan Interoperabilitas Sistem Layanan Digital Pemerintah Daerah

Saat ini banyak aplikasi dan sistem informasi yang dibangun secara terpisah oleh masing-masing OPD tanpa koordinasi terpadu, sehingga menimbulkan duplikasi, inefisiensi, dan rendahnya interoperabilitas antar-sistem.

Isu Strategis:

Membangun tata kelola layanan digital pemerintah daerah yang terstandar, terintegrasi, dan berbasis arsitektur SPBE

3. Lemahnya Tata Kelola Data dan Statistik Sektoral Daerah

Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di tingkat daerah menyebabkan banyak data sektoral yang tidak mutakhir, tidak terdokumentasi dengan baik, serta sulit diakses oleh pengguna internal maupun eksternal.

Isu Strategis:

Memperkuat tata kelola data statistik sektoral untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik berbasis data.

4. Kurangnya Efektivitas Diseminasi Informasi Pembangunan kepada Publik

Fungsi komunikasi publik dan kehumasan belum berjalan maksimal. Informasi yang disampaikan oleh pemerintah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih terjadi kesenjangan informasi, terutama di masyarakat desa dan wilayah pesisir.

Isu Strategis:

Meningkatkan efektivitas komunikasi publik pemerintah daerah agar lebih partisipatif, inklusif, dan membangun kepercayaan masyarakat

5. Kesiapan SDM dan Kelembagaan yang Masih Terbatas dalam Pelayanan TIK dan Informasi

Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM teknis baik di Dinas Kominfo maupun di OPD mitra, serta belum adanya kelembagaan khusus yang menangani sistem informasi secara terintegrasi, menghambat transformasi digital di tingkat daerah.

Isu Strategis:

Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan layanan public

6. Rendahnya Ketahanan Siber dan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Ancaman terhadap keamanan informasi dan sistem pemerintahan elektronik semakin meningkat, namun sistem pengamanan persandian dan keamanan siber di daerah belum tertata secara sistematis.

Isu Strategis:

Membangun sistem keamanan informasi dan ketahanan siber yang andal dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang aman dan terpercaya, melibatkan pengembangan kebijakan keamanan siber, pelatihan personel, dan penggunaan teknologi keamanan mutakhir

7. Minimnya Literasi Digital Masyarakat dan Edukasi Layanan Digital Pemerintah

Rendahnya pemahaman dan keterampilan digital di kalangan masyarakat, khususnya di desa dan kelompok rentan, menyebabkan layanan digital pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal.

Isu Strategis:

Meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memperkuat partisipasi dan pemanfaatan layanan digital pemerintah

H. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Diktum KEDUA huruf b, memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 239);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 Nomor 240, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 Nomor 242, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah;
19. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

I. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.

Sistematika Penyusunan LKjIP Dinas Kominfo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- BAB. I PENDAHULUAN, yang menjelaskan latar belakang, gambaran umum, tata laksana dinas, maksud dan tujuan, permasalahan, isu strategis, landasan hukum dan sistematika penulisan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA, yang menguraikan tentang ringkasan atau ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang memaparkan tentang Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2025.
- BAB IV PENUTUP, yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kominfo, rencana tindak lanjut dan komitmen yang akan dilakukan Dinas Kominfo untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana ditetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 2025-2029 dengan Tujuan :

VISI:

“Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan”

Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, hidup dalam harmoni, serta mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Makna dari Visi ini :

Maju:

Mencerminkan pencapaian pembangunan SDM yang unggul didukung kualitas hidup yang tinggi, berdaya saing ekonomi dengan kondisi kehidupan sosial dan budaya yang kondusif serta lingkungan yang lestari.

Sejahtera :

Menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga Maluku Tengah. Kesejahteraan di sini mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak, sehingga setiap individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. Masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasarnya secara adil dan merata, terbebas dari kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Rukun:

Menekankan pentingnya mewujudkan kehidupan masyarakat yang kondusif untuk menjamin dan mendukung kelancaran pembangunan daerah. Masyarakat terjaga dari hal yang mengganggu ketenteraman kehidupan, ditandai tatanan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi semangat persatuan dan persaudaraan, pelestarian adat budaya dalam kehidupan masyarakat yang beragam suku/etnis yang ada.

Berkeadilan:

Menekankan pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Maluku Tengah serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua orang, tanpa terkecuali, dalam upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta menciptakan kondisi yang adil dan setara bagi semua individu.

MISI:

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Panca Cita 1. Membangun SDM yang berkualitas, sehat dan terampil;
2. Panca Cita 2. Meningkatkan daya saing dan stabilitas perekonomian daerah;
3. Panca Cita 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing;
4. Panca Cita 4. Membangun ketahanan sosial budaya dan lingkungan;
5. Panca Cita 5. Membangun kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Kelima misi ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Kominfo, dalam menyusun arah strategis dan program kerja selama periode 2025–2029.

Uraian dari misi-misi yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

Panca Cita 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-Government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Pemerintah kabupaten Maluku Tengah berkeinginan mewujudkan good government dan clean government dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui reformasi birokrasi. Penyederhanaan layanan dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan ditransformasikan dengan pendekatan teknologi sistem informasi sehingga penyedia layanan dan pengguna layanan dapat melakukan interaksi melalui perangkat elektronik dengan cepat, mudah, dan murah.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2025-2029 bertujuan “**Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan**” Visi Pemerintah Kkabupaten Maluku Tengah sesuai dengan *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut

tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah selama lima tahun adalah: **Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif.**

Berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 800.1/SK/06/ Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, dokumen Renstra merupakan pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam melaksanakan Pembangunan Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinkominfo ditetapkan tujuan dan sasaran beserta target kinerja sebagai berikut;

Tabel 2.1.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025-2029

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	IKU	TARGET JANGKA MENENGAH						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan :										
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	%	√	6,00	6,05	6,09	6,15	6,2	6,25	Meningkat
Sasaran 1.										
Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	√	16,25	18,34	19,76	22,06	23,58	25,38	Meningkat
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	√	2,38	2,85	3,5	3,5	4,25	4,5	Meningkat
	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	√	12,20	15,85	21,95	24,39	25,61	26,59	Meningkat
	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Nilai	√	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	Meningkat
Sasaran 2.										
Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai	√	0,00	2,24	2,32	2,45	2,70	2,90	Meningkat
Sasaran 3.										
Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai		75,00	78,00	81,00	84,00	86,00	92,00	Meningkat

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah periode tahun 2025-2029 yang memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Selain itu, Renstra juga harus bisa menjawab tantangan dan permasalahan strategis terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kendala geografis dan demografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur dan akses masyarakat terhadap informasi agar kebijakan yang diambil dapat diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana Strategi dan Arah Kebijakan akan dicapai yang selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Strategi dan Arah Kebijakan dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Dengan rumusan arah kebijakan diharapkan dapat merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2025–2029, maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sebagai berikut;

1. Strategi

Memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah dalam kurun waktu 2025–2030, maka strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut;

- a) Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan layanan TIK di seluruh wilayah.
- b) Membangun sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis SPBE.
- c) Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral secara terpadu.
- d) Meningkatkan kualitas komunikasi publik yang partisipatif dan inklusif.
- e) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK dan komunikasi.
- f) Membangun sistem keamanan informasi dan persandian yang andal.
- g) Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
- h) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Diskominfo.

2. Kebijakan

Adapun arah kebijakan pelaksanaan dari strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a) Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan internet hingga desa dan pulau-pulau kecil
- b) Terlaksananya Optimalisasi kerja sama dengan BUMN/penyedia layanan
- c) Terlaksananya Pemetaan wilayah blank spot dan penyusunan roadmap pengembangan TIK
- d) Terlaksananya Penerapan arsitektur SPBE di seluruh OPD
- e) Terlaksananya Integrasi aplikasi layanan publik antar-perangkat daerah
- f) Terlaksananya Pengembangan dashboard layanan terintegrasi
- g) Terlaksananya Penguatan implementasi Satu Data Indonesia
- h) Terlaksananya Penyusunan metadata dan pemutakhiran data sektoral
- i) Terlaksananya Penguatan koordinasi walidata, produsen data, dan pembina data
- j) Terlaksananya Penguatan peran kehumasan pemerintah daerah
- k) Terlaksananya Optimalisasi kanal komunikasi digital (web, media sosial, radio)
- l) Terlaksananya Kampanye publik secara berkala terkait isu strategis pembangunan
- m) Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi teknis bagi ASN pengelola TIK dan PPID
- n) Terlaksananya Pembentukan unit layanan digital internal di OPD strategis
- o) Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi
- p) Terlaksananya Pengembangan kebijakan keamanan informasi daerah
- q) Terlaksananya Implementasi standar keamanan TIK (firewall, enkripsi, backup)
- r) Terlaksananya Pelatihan keamanan siber untuk ASN
- s) Terlaksananya Sosialisasi literasi digital di sekolah, desa, dan komunitas
- t) Terlaksananya Pengembangan konten edukatif digital berbasis lokal
- u) Terlaksananya Sinergi dengan BUMN dan komunitas digital untuk pelatihan publik
- v) Terlaksananya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya administrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah
- w) Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah
- x) Meningkatkan sumber daya aparatur yang professional.

Tabel. 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja Dinas	
1	2	3	4	5	
(Tujuan 3) Mewujudkan Pembangunan Tata Kelola Yang Berintegrasi dan Adaptif					
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	1.1. Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan layanan TIK di seluruh wilayah	1.1.1 Terlaksananya Fasilitasi perluasan jaringan internet hingga desa dan pulau-pulau kecil	1.1.1.1 Persentase desa/kelurahan yang memiliki akses internet memadai	
			1.1.2 Terlaksananya Optimalisasi kerja sama dengan BUMN/penyedia layanan	1.1.1.2 Jumlah titik layanan publik yang terhubung ke jaringan TIK	
			1.1.3 Terlaksananya Pemetaan wilayah blank spot dan penyusunan roadmap pengembangan TIK	1.1.1.3 Penurunan jumlah wilayah blank spot komunikasi	
		1.2. Membangun sistem layanan digital terintegrasi dan berbasis SPBE	1.2.1 Terlaksananya Penerapan arsitektur SPBE di seluruh OPD	1.2.1.1 Persentase aplikasi layanan yang terintegrasi antar-OPD	
			1.2.2 Terlaksananya Integrasi aplikasi layanan publik antar-perangkat daerah	1.2.1.2 Nilai indeks SPBE Kabupaten Maluku Tengah	
			1.2.3 Terlaksananya Pengembangan dashboard layanan terintegrasi	1.2.1.3 Jumlah layanan digital berbasis satu pintu	
		1.3. Memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral secara terpadu	1.3.1 Terlaksananya Penguatan implementasi Satu Data Indonesia	1.3.1.1 Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memperbarui metadata	
				1.3.2 Terlaksananya Penyusunan metadata dan pemutakhiran data sektoral	1.3.1.2 Jumlah data sektoral yang tersedia dan digunakan untuk perencanaan
				1.3.3 Terlaksananya Penguatan koordinasi walidata, produsen data, dan peminadana	1.3.1.3 Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap mekanisme satu data
		1.4. Meningkatkan kualitas komunikasi publik yang partisipatif dan inklusif	1.4.1 Terlaksananya Penguatan peran kehumasan pemerintah daerah	1.4.1.1 Persentase masyarakat yang mengakses informasi resmi pemerintah	
	1.4.1 Terlaksananya Optimalisasi kanal komunikasi digital (web, mediasosial, radio)			1.4.1.2 Jumlah konten informasi publik yang diproduksi dan disebarluaskan	
	1.4.1 Terlaksananya Kampanye publik secara berkala terkait isu strategis Pembangunan			1.4.1.3 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik	
	1.5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK dan komunikasi	1.5.1 Terlaksananya Pelatihan dan sertifikasi teknis bagi ASN pengelola TIK dan PPID	1.5.1.1 Jumlah SDM bersertifikat di bidang TIK dan informasi publik		
			1.5.2 Terlaksananya Pembentukan unit layanan digital internal di OPD strategis	1.5.1.2 Jumlah pelatihan/lokakarya yang dilaksanakan per tahun	
			1.5.3 Terlaksananya Kerja sama dengan lembaga pelatihan dan perguruan tinggi	1.5.1.3 Persentase OPD dengan unit pengelola layanan digital	
	1.6. Membangun sistem keamanan informasi dan persandian yang andal	1.6.1 Tersedianya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1.6.1.1 Jumlah insiden kebocoran data/sistem yang tertangani		
			1.6.2 Terlaksananya Implementasi standar keamanan TIK (firewall, enkripsi, backup)	1.6.1.2 Jumlah OPD yang menerapkan protokol keamanan informasi	
			1.6.3 Tersedianya Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	1.6.1.3 Tingkat kepatuhan terhadap SOP keamanan informasi	
	1.7. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi dan pendampingan	1.7.1 Terlaksananya Sosialisasi literasi digital di sekolah, desa, dan komunitas	1.7.1.1 Jumlah kegiatan literasi digital per tahun		
			1.7.2 Terlaksananya Pengembangan konten edukatif digital berbasis local	1.7.1.2 Jumlah masyarakat yang terlibat dalam program literasi digital	
1.7.3 Terlaksananya Sinergi dengan BUMN dan komunitas digital untuk pelatihan public			1.7.1.3 Persentase peningkatan partisipasi masyarakat terhadap layanan digital pemerintah		
2. Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	2.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Diskominfo	2.1.1 Terlaksananya Sistem Perencanaan, Penggaran, dan evaluasi serta tersedianya administrasi Keuangan, Kepegawaian perangkat daerah	2.1.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		2.1.2 Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja perangkat daerah	2.1.2.1 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam penunjang kinerja Perangkat Daerah		
		2.1.3 Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional	2.1.3.1 Jumlah sumber daya aparatur yang profesional		

C. Struktur Program dan Kegiatan

Struktur Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 sebagai penjabaran kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah maupun program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Pagu Indikatif			Sumber Dana
		Sebelum	Sesudah	Selisih (+/-)	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.388.424.900	4.926.369.450	462.055.450	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.912.909.100	3.499.953.650		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.318.200	34.768.200	29.550.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46.861.500	17.311.500	29.550.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.456.700	17.456.700	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.249.653.400	2.923.387.950	326.265.450	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.872.373.400	2.562.107.950	310.265.450	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	377.280.000	361.280.000	16.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.210.000	39.540.000	19.670.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	59.210.000	39.540.000	19.670.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.091.000	23.849.000	49.242.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.500.000	-	17.500.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.849.000	9.849.000	-	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	14.000.000	2.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.742.000	-	29.742.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.546.500	262.101.500	(21.555.000)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.396.500	66.396.500	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.350.000	12.905.000	445.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.800.000	4.800.000	(2.000.000)	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.000.000	23.000.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.000.000	155.000.000	(20.000.000)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.500.000	20.500.000	-	
	Pengadaan Mebel	20.500.000	20.500.000	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.970.000	128.070.000	31.900.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000	1.300.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.350.000	59.450.000	31.900.000	

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Pagu Indikatif			Sumber Dana
		Sebelum	Sesudah	Selisih (+/-)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.320.000	67.320.000	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.620.000	67.737.000	(22.117.000)	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	44.117.000	(7.117.000)	
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	3.620.000	13.620.000	(10.000.000)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	10.000.000	(5.000.000)	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	71.760.000	46.675.000	25.085.000	
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71.760.000	46.675.000	25.085.000	
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	39.370.000	22.135.000	17.235.000	
	Diseminasi Informasi	32.390.000	24.540.000	7.850.000	
	Program Aplikasi Informatika	1.351.527.300	1.344.747.300	6.780.000	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.478.500	41.478.500	-	
Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	41.478.500	41.478.500	-	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.310.048.800	1.303.268.800	6.780.000	
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	24.600.000	24.600.000	-	
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	29.312.000	26.322.000	2.990.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.256.136.800	1.252.346.800	3.790.000	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	52.228.500	34.993.500	17.235.000	
Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.228.500	34.993.500	17.235.000	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.117.500	5.882.500	17.235.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6.360.000	6.360.000	-	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.751.000	22.751.000	-	

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja berisi pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan 4 (empat) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang didukung oleh anggaran sebesar Rp.4.926.369.450,-.Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Tujuan, sasaran, indikator Tujuan dan sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah	Indikator Tujuan dalam Renstra Perangkat	Target Indikator Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan			Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	6,00	6,00	Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik serta Keamanan Informasi dan Komunikasi Daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/ kota	16,25	16,25
					Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	2,38	2,38
					Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	12,20	12,20
					Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	50,00	50,00
					Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0,00
			Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	75,00	75,00	

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 3.912.909.100	Rp 3.499.953.650
2	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 71.760.000	Rp 46.675.000
3	Program Aplikasi Informatika	Rp 1.351.527.300	Rp 1.344.747.300
4	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Persandian	Rp 52.228.500	Rp 34.993.500
	T O T A L	Rp 5.388.424.900	Rp 4.926.369.450

E. Rencana Kinerja Tahun 2025.

Perencanaan kinerja tahun 2025 merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dilakukan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan pencapaian indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3,706,360,000
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangundangan	100	%	
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan	100	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	11,310,000
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	2	Dokumen	11,310,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Laporan	2,960,752,000
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahteraannya terpenuhi	29	Orang	2,489,752,000
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Laporan	471,000,000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	1	Laporan	43,050,000
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	43,050,000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	10,000,000
a.	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	10,000,000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Laporan	438,708,000
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket	216,708,000
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	24,250,000
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	4,050,000
b.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	23,000,000
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	170,700,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	Laporan	180,130,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2,400,000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	88,450,000
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	89,280,000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Unit	62,410,000
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	47,000,000
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	Peralatan	5,410,000
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10,000,000
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	25.00	%	97,814,000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	97,814,000
a.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1	Dokumen	20,000,000
b.	Pengelolaan media komunikasi public	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Pengelolaan media komunikasi public	1	Dokumen	21,164,000
c.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan hubungan media	1	Layanan	21,650,000
d.	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat media dan komunikasi dalam mendesimisasi informasi program dan kegiatan	3	Dokumen	35,000,000
III	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	69.55	%	737,365,100
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	661,685,100
a.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Domain	14,000,000
b.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	42,030,000
c.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Sistem	605,655,100
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	2	Laporan	75,680,000
a.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan <i>E -Government</i> dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	45,680,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34	OPD	30,000,000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	68.71	%	41,364,000
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	8	Laporan	10,200,000
a.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	8	PD	10,200,000
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	8	Laporan	31,164,000
a.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	8	PD	31,164,000

Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah mengelola anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Maluku Tengah sejumlah Rp. 4.926.369.450,- dan Anggaran Belanja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	Ket
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	16,25	Program Aplikasi Informatika	46.675.000	IKU
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,38	Program Aplikasi Informatika	1.344.747.300	
		Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	12,20			
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	50	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	34.993.500	
		Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis IKU			1.426.415.800	
2	Sasaran 2 : Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.499.953.650	Non IKU
					Jumlah anggaran program mendukung Sasaran Strategis Non IKU	
Total Pagu Anggaran					4.926.369.450	

BAB III

AKUNTABELITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada prinsipnya Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian kinerja organisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Capaian kinerja akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika dalam mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk mendukung pembangunan di bidang komunikasi dan informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis DISKOMINFO digambarkan sebagai berikut :

Tabel : Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	> 100	Sangat Memuaskan	Biru
2.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
3.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
4.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
5.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
6.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: *Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

3.1.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Gambaran realisasi pencapaian kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Analisis dan Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	%	6,00	6,40	106,67	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6.00% dan Realisasinya mencapai 6,40% atau sebesar 106,67% dengan implementasi SANGAT BAIK	SANGAT MEMUASKAN

Tabel Rumusan Formula Perhitungan Indikator
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

NO.	URUSAN	NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN (PERSAMAAN)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Komunikasi dan Informatika	1	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	$\frac{\text{Akses} + \text{Penggunaan} + \text{Keahlian}}{3} \times 100 \%$	6.40 %	Terlampir

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks
1.	Indeks Akses dan Infrastruktur	6.61
	a. Persentase Rumah Tangga dengan Telepon Seluler	10.15
	b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	9.69
	c. Persentase Rumah Tangga dengan Komputer	0
2.	Indeks Pengguna TIK	6.36
	a. Persentase Individu Pengguna Internet	9.69
	b. Persentase Penggunaan Broadband	9.40
	c. Persentase Individu yang Menggunakan Komputer	0
3.	Indeks Keahlian TIK	6.21
	a. Rata-rata Sekolah	3.78
	b. Angka Partisipasi Pendidikan Menengah/Tinggi	6.88
	c. Tingkat Literasi Digital Masyarakat	7.99
	TOTAL	6.40

Sumber Data : BPS

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa realisasi capaian kinerja Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 berada pada kriteria Sangat Memuaskan.

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Real	% Real	Analisis dan Evaluasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	16,25	19,88	122,34	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 16,25% dan Realisasinya mencapai 19,88% atau sebesar 122,34 % dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	2,38	2,24	94,12	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,38% dan Realisasinya mencapai 2,24% atau sebesar 94,12% dengan Interpretasi SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	12,20	13,21	108,28	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 12,20% dan Realisasinya mencapai 13,21% atau sebesar 108,28% dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN
		Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	%	50,00	16,67	33,34	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 50% dan Realisasinya mencapai 16,67% atau sebesar 33,34% dengan Interpretasi KURANG, dan perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	SANGAT RENDAH
	Sasaran 2 : Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	0	0	0	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 belum ditargetkan dan akan di Realisasikan pada tahun 2026	
	Sasaran 3 : Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	%	75	78,85	105,13	Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 ditargetkan sebesar B dan Realisasinya mencapai BB atau sebesar 105,133 dengan Interpretasi SANGAT MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 berada pada kriteria Sangat Memuaskan.

Dari beberapa indikator sasaran strategis yang disajikan terdapat tiga indikator sasaran strategis yang memiliki nilai interpretasi sangat memuaskan yaitu ;

- a). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b). Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c). Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Tabel Rumusan Formula Perhitungan Indikator

NO.	URUSAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN (PERSAMAAN)	CAPAIAN KINERJA	
	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan perintah daerah kabupaten	59.432	19,88
			Jumlah penduduk	298.975	

Data Pendukung

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan perintah daerah kabupaten (Data Jumlah Penduduk Usia 15 -64 Tahun)

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Saparua	11.839
2	Kota Masohi	26.200
3	Seram Utara Timur Kobi	9.723
4	Seram Utara Timur Seti	11.670
Jumlah		59.432

DATA JUMLAH PENDUDUK USIA 15-64 TAHUN

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Amahai	34.611
2	Teonila Serua	9.966
3	Seram Utara	14.904
4	Banda	15.768
5	Tehoru	16.972
6	Saparua	11.839
7	Pulau Haruku	17.413
8	Salahutu	37.788
9	Leihitu	39.014
10	Nusa Laut	3.411
11	Kota Masohi	26.200
12	Seram Utara Barat	8.789
13	Teluk Elpaputih	6.865
14	Leihitu Barat	13.723
15	Telutih	9.400
16	Seram Utara Timur Seti	11.670
17	Seram Utara Timur Kobi	9.723
18	Saparua Timur	10.919
Jumlah		298.975

Sumber Data : Disduk Capil Maluku Tengah

Tabel Rumusan Formula Perhitungan Indikator
INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE)

NO.	URUSAN	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN (PERSAMAAN)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Komunikasi dan Informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE dihitung dari 4 domain utama, yang kemudian dipecah menjadi 8 aspek:		
			1. Kebijakan Internal (Kebijakan Tata Kelola & Layanan).		
			2. Tata Kelola (Kelembagaan & Strategi).		
			3. Manajemen (Risiko, Keamanan, Data, SDM, dll).	2.24 %	Terlampir
			4. Layanan (Administrasi & Publik).		
			<i>(Berdasarkan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020)</i>		

Sumber Data : Bidang E-Government (Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Maluku Tengah Tahun 2025)

Nama Form	: Evaluasi SPBE
Tahun	: 2025
<p>Deskripsi :</p> <p>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.</p>	
Pemerintah Kab. Maluku Tengah	
K/L/D	: Pemerintah Kabupaten
Indeks SPBE	: 2,24
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 3
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	: 3
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,2
Perencanaan Strategis SPBE	: 1
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1
Penerapan Manajemen SPBE	: 1
Pelaksanaan Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 3,03
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,6
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3

No.	Indikator	Level
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1

Sumber Data : Bidang E-Government (Hasil Laporan Evaluasi Indeks SPBE Menpanrb Tahun 2025)

102

Tabel Rumusan Formula Perhitungan Indikator
 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Tersedia Oleh Dinas Kominfo

No.	Urusan	No	IKK	RUMUSAN (PERSAMAAN)	CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang tersedia oleh dinas Kominfo	Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	7	13,21	Terlampir
				Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD)	53		

Sumber Data : Bidang E-Government (Hasil Laporan Evaluasi Indeks SPBE Menpanrb Tahun 2025)

Jumlah OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	INTERNET				INTERNET DARI KOMINFO	STATUS
		Titik	SUMBER LAIN				
			ISP	Produk	Bandwidth		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1		Telkom	150	Indihome	Aktif
2.	Baplitbangda	1		Telkom	20	Astinet	Aktif
3.	DPRD	1		Telkom	50	Astinet	Aktif
4.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1		Telkom	5	Astinet	Aktif
5.	Dinas Perpustakaan Daerah	1		Telkom	4	Astinet	Aktif
6.	Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1		Telkom	4	Astinet	Aktif
7.	RSUD Masohi	1		Telkom	10	Astinet	Aktif
8.	BPKAD	3		Telkom	9	Astinet	Aktif
TOTAL = 8 Jaringan		1 Jaringan Indihome			7 Jaringan Astinet		

Jumlah Perangkat Daerah

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2.	Dinas Sosial
3.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Dinas Koperasi & UKM
6.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
7.	Kecamatan Kota Masohi
8.	RSUD Masohi
9.	DPRD
10.	Dinas Pariwisata
11.	Badan Pendapatan Daerah
12.	Badan Kesbangpol
13.	Dinas Perkebunan & Pertenakan
14.	Dinas Perikanan
15.	Dinas Kesehatan
16.	Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tengah
17.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.	Dinas Komunikasi & Informatika
19.	Dinas Perhubungan Maluku Tengah
20.	Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana
21.	Dinas Tanaman Pangan & Hultikultura
22.	Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja
23.	Dinas Perpustakaan
24.	Sekretariat Daerah
25.	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman
26.	Inspektorat
27.	BKD Masohi
28.	Dinas Catatan Sipil Maluku Tengah
29.	SAT POL PP Maluku Tengah
30.	Dinas Pemberdayaan masyarakat & Negeri, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
31.	Dinas Pemuda dan Olah raga
32.	Bagian Ekonomi & Pembangunan
33.	Badan Pendapatan Daerah
34.	PPKAD
35.	RSUD Saparua
36.	RSUD Banda
37.	Kecamatan Kota Amahai
38.	Kecamatan Kota Tehoru
39.	Kecamatan Kota Teon Nila Serua
40.	Kecamatan Kota Nusa Laut
41.	Kecamatan Pulau Haruku

No	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
42.	Kecamatan Kota Saparua
43.	Kecamatan Kota Salahutu
44.	Kecamatan Kota Leihitu
45.	Kecamatan Kota Banda
46.	Kecamatan Kota Seram Utara
47.	Kecamatan Kota Leihitu Barat
48.	Kecamatan Kota Seram Utara Barat
49.	Kecamatan Kota Teluk Elpaputih
50.	Kecamatan Kota Seram Utara Timur Seti
51.	Kecamatan Kota Seram Utara Timur Kobi
52.	Kecamatan Kota Telutih
53.	Kecamatan Kota Saparua Timur

**Tabel Rumusan Formula Perhitungan Indikator
Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)**

NO.	URUSAN	NO	INDIKATOR SASARAN	RUMUSAN (PERSAMAAN)	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	Komunikasi dan Informatika	1	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	$\frac{\text{Jumlah nilai per keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}} \times 100 \%$ $\frac{153}{915} \times 100 \%$	16,67 %	Terlampir

Sumber Data : Urusan Persandian (Laporan KAMI Kabupaten Maluku Tengah

Dari penjelasan tabel tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 berada pada kriteria Sangat Memuaskan.

Dari beberapa indikator sasaran strategis yang disajikan terdapat tiga indikator sasaran strategis yang memiliki nilai interpretasi sangat memuaskan yaitu ;

- a). Persentase tersedianya Pemenuhan Jaringan Daerah;
- b). Persentasi Desa Terakses Jaringan Telekomunikasi;
- c). Presentase Keterbukaan Informasi Publik.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.1.2 berikut ini :

Tabel 3.1.2

Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	%	61,51	59,51	96,75	6,00	6,40	106,67

Dari tabel 3.1.2 menjelaskan yang pertama pada Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, realisasi kinerja pada tahun 2025 meningkat walaupun penetapan target yang berbeda dengan tahun 2024, peningkatan ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah membaik.

Pencapaian Kinerja dan Realisasi Sasaran Tahun 2025 dan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%
				Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,1	Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	25,00	41,95	167,80	16,25	19,88	122,34
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	2,31	2,24	96,97	2,38	2,24	94,12
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	48,57	52,91	108,94	12,20	13,21	108,28
		Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi	%	100	51,94	51,94	50,00	16,67	33,34
1,2	Sasaran 2 : Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72	78,85	109,51	75	-	

Dari tabel 3.1.2 menjelaskan indikator sasaran strategis yang disajikan menunjukkan penurunan capaian realisasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dengan indikator sasaran yaitu ;

- a). Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota capaian realisasi menurun sebesar 45,46% (167,94 – 122,34) dibandingkan tahun 2024;
- b). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan capaian realisasi menurun sebesar 2,85% (96,97 – 94,12) dibandingkan tahun 2024; Karena tidak ada penilaian indikator disebabkan ada perubahan kebijakan dari Menpan RB tentang SPBE menuju Pemerintahan Digital (Pemdi)
- c). Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi menurun sebesar 0,66% (108,94 – 108,24) dibandingkan tahun 2024 disebabkan adanya efisiensi anggaran sehingga mengakibatkan beberapa OPD untuk pembayaran internetnya dikembalikan ke OPD masing-masing;
- d). Sedangkan indikator sasaran Index Keamanan Komunikasi dan Informasi mengalami penurunan sangat signifikan disebabkan penetapan target pada tahun 2025 tidak mengacu pada target OPD yang akan dijadikan sampel untuk mengukur Tingkat kematangan kewanaman informasi pada system elektronik OPD terkait dibandingkan tahun 2024.

3.1.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

Tabel 3.1.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Indikator Tujuan	Capaian 2024	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan $8=5/7*100$
			Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	96,75	6,00	6,40	106,67	6,20	103,23

Dari tabel 3.1.3 menjelaskan yang pertama pada Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, realisasi kinerja pada tahun 2025 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2024, Tingkat kemajuan mencapai 103,23% menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target.

No	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Tahun 2025		%	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi			$8=5/7*100$
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	167,8	16,25	19,88	122,34	25,38	78,33
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	96,97	2,38	2,24	94,12	4,5	49,78
3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	108,94	12,20	13,21	108,28	26,59	49,68
4	Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	51,94	50,00	16,67	33,34	85,00	19,61
5	Nilai SAKIP	109,51	75	78,85	105,13	92,00	85,71

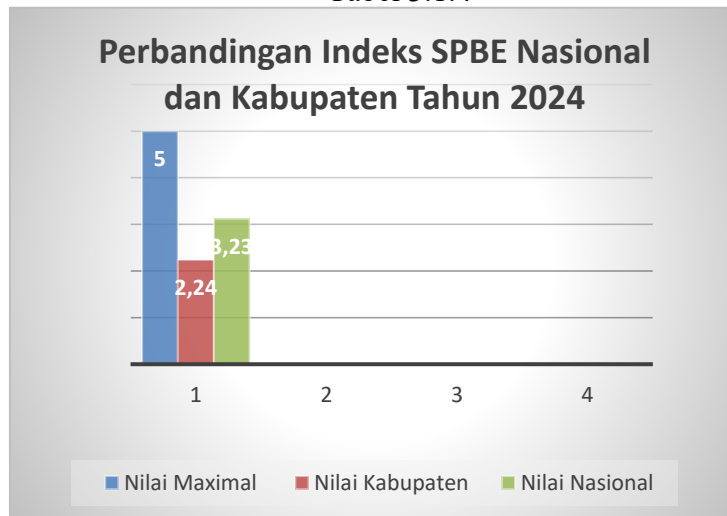
Dari Tabel 3.1.3 tersebut diatas, dapat diketahui perbandingan capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 2025-2029 secara umum progress capaian kinerja mengarah ketercapaian target akhir kinerja Renstra 2025-2029, bahkan capaian beberapa indikator sudah melebihi target kinerja akhir Renstra 2025-2029. dengan penjelasan sebagai berikut :

- a). Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan Tingkat kemajuan mencapai 78,33% menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai masih berada di bawah separuh dari target;
- b). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Tingkat kemajuan mencapai 49,78% menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target;
- c). Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Tingkat kemajuan 49,68% menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai target;
- d). Index Keaman Komunikasi dan Informasi dengan Tingkat kemajuan mencapai 19,61% menunjukkan bahwa kemajuan yang dicapai masih berada di bawah separuh dari target.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian Indeks SPBE Nasional dan Kabupaten Maluku Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 3.1.4



Sumber Data : LHE Indeks SPBE Tahun 2025

Berikut narasi perbandingan Indeks SPBE Nasional dengan Kabupaten Maluku Tengah:

Pada skala maksimal 5, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional saat ini mencapai nilai **3,23**, yang mencerminkan kategori "**Baik**". Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di tingkat nasional telah berjalan cukup efektif.

Sementara itu, Kabupaten Maluku Tengah memperoleh nilai **2,24** dari skala 5, yang berada dalam kategori "**Cukup**". Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Maluku Tengah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek tata kelola, layanan digital, serta integrasi sistem pemerintahan elektronik.

Dari perbandingan ini, terlihat adanya selisih **0,99 poin** antara indeks nasional dan indeks Kabupaten Maluku Tengah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya penerapan SPBE di daerah sudah berjalan, masih diperlukan strategi penguatan agar sejalan dengan standar nasional. Optimalisasi kebijakan digitalisasi pemerintahan di tingkat daerah dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan berbasis elektronik di Kabupaten Maluku Tengah.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang dilakukan

Adapun gambaran analisis capaian kinerja keberhasilan, kegagalan, dan solusi pencapaian/ peningkatan pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2025		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi serta Pemerataan Konektivitas Infrastruktur Telekomunikasi Perkotaan dan Perdesaan yang berkelanjutan dan inklusif	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	%	6,00	6,40	106,67	SANGAT BAIK

Berikut adalah analisis penyebab keberhasilan, kegagalan, dan solusi dalam pencapaian indikator tujuan Cakupan Infrastruktur dan Layanan Publik yang Terintegrasi sebagai berikut :

1. Penyebab Keberhasilan

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian 106,67% dari target antara lain:

- Peningkatan Infrastruktur dan Akses TIK: Bertambahnya ketersediaan jaringan internet, perluasan akses broadband, serta pengurangan wilayah blankspot di perkotaan dan perdesaan.
- Optimalisasi Program Pemerataan Konektivitas : Dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan jaringan telekomunikasi dan pemanfaatan layanan internet publik (WiFi publik, fasilitas layanan digital).
- Meningkatnya Literasi dan Pemanfaatan TIK Masyarakat: Bertambahnya individu yang menggunakan komputer dan internet untuk pendidikan, ekonomi, dan layanan pemerintahan.
- Penguatan Tata Kelola SPBE dan Layanan Digital Pemerintah: Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik mendorong peningkatan penggunaan dan kualitas layanan digital.
- Kolaborasi dengan Provider dan Pemangku Kepentingan : Sinergi dengan penyedia layanan telekomunikasi dalam memperluas cakupan jaringan.

2. Penyebab Kegagalan/Penurunan Capaian

Meskipun pencapaian cukup tinggi, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan target belum sepenuhnya tercapai:

- Kondisi Geografis dan Sebaran Wilayah Kepulauan: Tantangan topografi dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau jaringan.
- Keterbatasan Anggaran: Refocusing atau keterbatasan fiskal dapat menghambat pengembangan infrastruktur TIK..
- Kurangnya Integrasi Data dan Sistem : Jika pengembangan aplikasi dan sistem tidak terintegrasi, maka dampaknya terhadap indeks menjadi tidak signifikan..
- Ketimpangan Literasi Digital: Masih adanya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan TIK.
- Gangguan Teknis dan Kualitas Jaringan : Keterbatasan kapasitas bandwidth, gangguan jaringan, atau belum optimalnya kualitas layanan.

3. Solusi dan tindak lanjut untuk Peningkatan Capaian

Untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, beberapa Langkah strategis dapat dilakukan:

- Perluasan dan Pemetaan Infrastruktur Berbasis Data: Melakukan pemetaan wilayah blankspot secara berkala dan menyusun prioritas pembangunan jaringan.
- Penguatan Program Literasi Digital: Pelatihan TIK bagi ASN, pelajar, UMKM, dan masyarakat umum untuk meningkatkan komponen skill pada IP-TIK..
- Optimalisasi Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dan Swasta: Mengakses program dukungan seperti perluasan BTS, bantuan internet desa, dan program transformasi digital nasional.
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Indikator IP-TIK: Melakukan evaluasi triwulanan terhadap komponen akses, penggunaan, dan keahlian (skill).
- Peningkatan Kualitas Layanan SPBE dan Statistik Sektor: Memastikan layanan digital pemerintah benar-benar dimanfaatkan masyarakat dan terdokumentasi dalam data statistik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan target 61,51% dapat tercapai sepenuhnya atau bahkan melampaui angka yang ditargetkan di masa mendatang.

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Tahun 2025		%	Kategori
				Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	16,25	19,88	122,34	SANGAT BAIK
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,38	2,24	94,12	CUKUP
		Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	12,20	13,21	108,28	SANGAT BAIK
		Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	Nilai	50,00	16,67	33,34	KURANG
	Sasaran 2 :Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	75	-		Belum Ada Penilaian SAKIP

Berdasarkan penjelasan diatas dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

a) Penyebab Keberhasilan :

- Intensifikasi diseminasi informasi melalui media sosial, website resmi, dan media publik lainnya.
- Peningkatan frekuensi publikasi program prioritas pemerintah daerah.
- Pemanfaatan kanal komunikasi digital yang lebih luas dan mudah diakses masyarakat.
- Kolaborasi dengan media lokal dan perangkat daerah dalam penyebarluasan informasi.

b). Potensi Faktor Penurunan ke Depan:

- Terbatasnya anggaran publikasi dan diseminasi informasi.
- Rendahnya minat baca atau literasi informasi sebagian masyarakat.
- Kurangnya inovasi dalam metode komunikasi publik.

c). Solusi dan tindak lanjut untuk Peningkatan Capaian

Untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, beberapa Langkah strategis dapat dilakukan:

- Diversifikasi media komunikasi (video pendek, infografis, podcast).
- Penguatan survei kepuasan dan pemahaman publik secara berkala.
- Optimalisasi peran PPID dan pengelolaan konten berbasis segmentasi audiens.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

a). Faktor Penyebab Penurunan Capaian:

- Belum optimalnya integrasi aplikasi antar perangkat daerah..
- Keterbatasan SDM pengelola SPBE.: Kurangnya pelatihan dan kesiapan aparatur dalam mengelola layanan berbasis elektronik.
- Infrastruktur server dan jaringan belum sepenuhnya stabil.
- Dokumen arsitektur SPBE belum sepenuhnya terimplementasi.

b). Solusi untuk Peningkatan Capaian:

- Meningkatkan interoperabilitas sistem pemerintahan digital untuk mencegah silo data yang menyebabkan kurangnya integrasi antarbagian dalam suatu organisasi, sehingga menghambat kolaborasi, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis data
- Meningkatkan pelatihan aparatur sipil negara dalam penggunaan dan pengelolaan SPBE.
- Mendorong kebijakan percepatan digitalisasi layanan pemerintahan daerah.

c). Solusi dan tindak lanjut untuk Peningkatan Capaian

Untuk mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan, beberapa Langkah strategis dapat dilakukan:

- Penyusunan dan implementasi roadmap SPBE yang terukur.
- Integrasi dan rasionalisasi aplikasi yang tumpang tindih.
- Peningkatan kapasitas SDM TIK melalui pelatihan teknis.
- Penguatan tata kelola dan monitoring evaluasi SPBE secara berkala.

3. Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

a) Faktor Penyebab Keberhasilan:

- Perluasan jaringan intra pemerintah daerah.: Investasi dalam menara BTS dan fiber optic di daerah pedesaan.
- Dukungan dari Penyedia Layanan Swasta: Peningkatan kebutuhan konektivitas untuk layanan digital..
- Dukungan kebijakan integrasi sistem antar OPD.

- b) Potensi Hambatan:
 - Keterbatasan bandwidth dan kapasitas jaringan.
 - Gangguan teknis akibat kondisi geografis.
 - Belum meratanya perangkat pendukung di seluruh OPD.
 - c) Solusi dan tindak lanjut untuk Peningkatan Capaian
 - Peningkatan kapasitas bandwidth.
 - Pemeliharaan rutin jaringan intra.
 - Penguatan keamanan jaringan internal.
4. Indeks Keamanan Komunikasi dan Informasi
- a) Faktor Penyebab Kegagalan:
 - Belum terbentuknya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif.
 - Ketiadaan atau belum optimalnya penerapan manajemen risiko keamanan informasi.
 - Kurangnya audit keamanan sistem dan sertifikasi keamanan informasi.
 - Rendahnya kesadaran keamanan siber pada ASN.
 - b) Solusi dan Tindak Lanjut Strategis untuk Peningkatan Capaian:
 - Penyusunan kebijakan dan standar operasional keamanan informasi.
 - Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT)..
 - Pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala.
 - Pelatihan keamanan siber bagi ASN.
 - Implementasi sistem backup dan disaster recovery plan.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber daya

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2025 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.1.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Keterangan
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	122,34	98,79	123,84	Efisien (Capaian lebih tinggi dari serapan)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	94,12	99,34	94,75	Cukup Efisien (Hampir sesuai dengan anggaran)
Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	108,28	100	108,28	Efisien (Kinerja melampaui serapan anggaran)
Indekx Keamanan Komunikasi dan Informasi	33,34	100	33,34	Kurang Efisien (Capaian lebih rendah dari serapan)

Interpretasi:

Jika Tingkat Efisiensi > 100%, berarti capaian lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan (Efisien).

Jika Tingkat Efisiensi sekitar 100%, berarti serapan dan capaian seimbang (Cukup Efisien).

Jika Tingkat Efisiensi < 100%, berarti anggaran telah digunakan penuh tetapi capaian masih kurang (Kurang Efisien).

Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 40 (Empat puluh satu) orang dengan rincian 6 (enam) pejabat struktural, 5 (lima) pejabat fungsional dan 29 (Dua puluh sembilan) pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian didukung anggaran sebesar **Rp.4,926,369,350,- dan terserap sebesar Rp.4,750,251,635,-** Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan rata- rata capaian **96.43%**.

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada tahun 2025, anggaran pada P-APBD 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar **4,926,369,350,-**, antara lain :

Tabel 3.1.7
Analisis Program dan Kegiatan

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3.499.953.650
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100	%	
		Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundangundangan	100	%	
		Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundangundangan	100	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Dokumen	34.768.200
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	2	Dokumen	17.311.500
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Dokumen	17.456.700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Laporan	2.923.387.950
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahtraannya terpenuhi	40	Orang	2.562.107.950
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Laporan	361.280.000
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	1	Laporan	39.540.000
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	Laporan	39.540.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Dokumen	23.849.000
a.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	9.849.000
b.	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	14.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Laporan	262.101.500
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	66.396.500
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	12.905.000
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4.800.000
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	23.000.000
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	155.000.000
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah			20.500.000
a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	20.500.000
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pementas Daerah	3	Laporan	128.070.000
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan	1.300.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	59.450.000
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	67.320.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Unit	67.737.000
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	44.117.000
b.	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7	Peralatan	13.620.000

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Anggaran
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	10.000.000
II	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	16,25	%	46.675.000
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	46.675.000
a.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	4	Komunitas	22.135.000
b.	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25	%	24.540.000
III	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	14,58	%	1.344.747.300
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	41.478.500
a.	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	15	Dokumen	41.478.500
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	2	Laporan	1.303.268.800
a.	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	8	Dokumen	24.600.000
b.	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	5	Dokumen	26.322.000
c.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	9	OPD	1.252.346.800
IV	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	50	%	34.993.500
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Persandian dan Pengamanan Informasi	8	Laporan	34.993.500
a.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	Dokumen	5.882.500
b.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	Laporan	6.360.000
c.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	20	OPD	22.751.000

3.2. REALISASI ANGGARAN

3.2.1. Efisiensi Anggaran.

Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kominfo dalam rangka mencapai sasaran kinerja sesuai dengan target Renja Tahun 2025 terlihat dari Realisasi Belanja Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 4.749.697.835,- atau 96,41% dari Pagu DPA sebesar Rp. 4.926.369.450,- Dengan rincian Realisasi Belanja Pegawai 2.482.255.771,- atau 96,88% dari pagu Rp. 2.562.107.950,- Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.223.264.064,- atau 95,97% dari pagu anggaran Rp.2.316.561.500,-. dan Realisasi Belanja Modal Perlatan dan Mesin sebesar Rp.44.178.000 atau atau 92,62% dari pagu sebesar Rp. 47.700.000,-

Tabel 3.2.1

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

KODE	URAIAN BELANJA	2025			2024
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
5,1	BELANJA OPERASIONAL	4.878.668.950	4.705.519.835	96,45	4.568.084.512
5.1.01	Belanja Pegawai	2.562.107.950	2.482.255.771	96,88	2.650.483.003
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.316.561.000	2.223.264.064	95,97	1.917.601.509
5.2.	Belanja Modal	47.700.000	44.178.000	92,62	147.615.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.700.000	44.178.000	92,62	147.615.000
	Belanja Daerah	4.926.368.950	4.749.697.835	96,41	4.715.699.512

Realisasi Anggaran Berdasarkan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2025.

Realisasi anggaran Belanja Operasional Dinas Kominfo berdasarkan program dapat dilihat pada Tabel 3.2.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.2

LAPORAN REALISASI KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Keuangan		% Realisasi Keuangan dan Fisik		Kinerja		Ket
					Pagu	Realisasi	Kcu	Fis	Volume	Satuan	
2.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika		%	100	4.926.369.450	4.749.697.835	96,41	100,00			
2.16.01.2.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	3.499.953.650	3.326.488.815	95,04	100,00	100	%	
2.16.01.2.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	34.768.200	32.977.000	94,85	100,00	2	Dokumen	
2.16.01.2.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan evaluasi	Dokumen	2	17.311.500	15.711.500	90,76	100,00	2	Dokumen	
2.16.01.2.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	17.456.700	17.265.500	98,90	100,00	3	Dokumen	
2.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	2	2.923.387.950	2.761.535.771	94,46	100,00	2	Dokumen	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Kesejahteraannya erpenuhi	Orang	33	2.562.107.950	2.482.255.771	96,88	100,00	33	Orang	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	361.280.000	279.280.000	77,30	100,00	1	Laporan	
2.16.01.2.03.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen/laporan barang milik daerah	Laporan	9	39.540.000	39.380.000	99,60	100,00	9	Laporan	

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Keuangan		% Realisasi Keuangan dan Fisik		Kinerja		Ket
					Pagu	Realisasi	Keu	Fis	Volume	Satuan	
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	9	39.540.000	39.380.000	99,60	100,00	9	Laporan	
2.16.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	25	23.849.000	23.849.000	100,00	100,00	25	%	
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	9.849.000	9.849.000	100,00	100,00	1	Dokumen	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	14.000.000	14.000.000	100,00	100,00	4	Orang	
2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	25	262.101.500	258.979.500	98,81	100,00	25	%	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	66.396.500	63.303.500	95,34	100,00	5	Paket	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	12.905.000	12.883.000	99,83	100,00	2	Dokumen	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	1	Paket	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	23.000.000	22.993.000	99,97	100,00	1	Dokumen	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	155.000.000	155.000.000	100,00	100,00	12	Laporan	
2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	25	20.500.000	19.980.000	97,46	100,00	25	%	
2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	20.500.000	19.980.000	97,46	100,00	2	Paket	
2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan	25	128.070.000	123.318.419	96,29	100,00	25	Laporan	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.300.000	1.294.000	99,54	100,00	1	Laporan	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	59.450.000	54.704.419	92,02	100,00	12	Laporan	
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	67.320.000	67.320.000	100,00	100,00	12	Laporan	
2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	Unit	10	67.737.000	66.469.125	98,13	100,00	10	Unit	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	44.117.000	42.849.125	97,13	100,00	2	Unit	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan	7	13.620.000	13.620.000	100,00	100,00	7	Peralatan	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	1	Layanan	
2.16.02.2.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Publikasi Informasi Melalui Media Online	%	25	46.675.000	46.108.600	98,79	100,00	25	%	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	2	46.675.000	46.108.600	98,79	100,00	2	Laporan	
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	4	22.135.000	21.985.000	99,32	100,00	4	Komunitas	
2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%	25	24.540.000	24.123.600	98,30	100,00	25	%	

KODE	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi Keuangan		% Realisasi Keuangan dan Fisik		Kinerja		Ket
					Pagu	Realisasi	Keu	Fis	Volume	Satuan	
2.16.03.2	Program Aplikasi Informatika	Presentase E-Government yang terintegrasi	%	14,38	1.344.747.300	1.342.536.920	99,84	100,00	14,38	%	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	41.478.500	39.625.000	95,53	100,00	1	Laporan	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	41.478.500	39.625.000	95,53	100,00	1	Dokumen	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten	Laporan	3	1.303.268.800	1.302.911.920	99,97	100,00	3	Laporan	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Dokumen	1	24.600.000	24.275.000	98,68	100,00	1	Dokumen	
2.16.03.2.02.0033	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	5	26.322.000	26.322.000	100,00	100,00	5	Dokumen	
2.16.03.2.02.0039	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD	9	1.252.346.800	1.252.314.920	100,00	100,00	9	PD	
2.21.02.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Keamanan Bidang Persandian	%	50,00	34.993.500	34.563.500	98,77	100,00	50	%	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dokumen	3	34.993.500	34.563.500	98,77	100,00	3	Dokumen	
2.21.02.2.01.0005	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	5.882.500	5.877.500	99,92	100,00	1	Dokumen	
2.21.02.2.01.0007	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	6.360.000	6.360.000	100,00	100,00	1	Laporan	
2.21.02.2.01.0008	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	PD	20	22.751.000	22.326.000	98,13	100,00	20	PD	

Sesuai rencana kerja program dan kegiatan yang tertuang dalam DPA Dinas Kominfo Tahun Anggaran 2024, Dinas Kominfo sedianya akan melaksanakan 4 program, 12 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

1. Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana untuk penyebarluasan/diseminasi informasi pemerintah daerah Dinas Kominfo lebih memanfaatkan media online untuk lebih mengefektifkan penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia Dinas Kominfo melakukan memberdayakan tenaga ASN 40 orang yang dinilai bekerja efektif. Hal ini juga dilakukan untuk lebih mengefektifkan

kinerja seluruh pegawai serta optimalisasi pemanfaatan sarana TIK dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Dinas Kominfo telah melakukan analisa terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan analisis terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja selama tahun 2025 antara lain :

1. Fasilitasi pelaksanaan telekonferensi/rapat-rapat pemerintah daerah yang diselenggarakan secara online melalui video conference (vidcon). Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencegah penurunan inflasi. Adanya dukungan dari perangkat daerah (PD) yang menangani sendiri peralatan jaringan lingkup internal perangkat daerah sehingga pengelola jaringan kabupaten bisa fokus menangani jaringan utama (backbound) antar perangkat daerah, serta dukungan dari perangkat daerah yang berusaha mengamankan sendiri setiap perangkat yang digunakan terutama data dan aplikasi dengan tingkat security level menengah.
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Satu Data Maluku Tengah dan Penyelenggaraan Kominfo di Kabupaten Maluku Tengah.
4. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.
5. Pengembangan dan pengelolaan website pemerintah daerah (maltengkab.go.id) yang bertujuan membantu penyampaian informasi kepada masyarakat, yang mendukung publikasi melalui media cetak, media sosial dan media online.
6. Diseminasi dan penyebarluasan informasi Program Pencegahan Stunting.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal dilaksanakan dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember 2024, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 telah dilaksanakan. Selain kegiatan operasional rutin, beberapa kegiatan yang menjadi tugas pokok yang mendukung pencapaian indikator kinerja telah terlaksana sesuai target yang ditetapkan, maka kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama Tahun 2025 sebagaimana uraian data tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Capaian kinerja tujuan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah ” berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) indeks SPBE tahun 2025 sebesar 2,24 kurang dari target sebesar 2.38, dengan persentase capaian sebesar 96,97% (cukup), nilai Indeks SPBE tahun 2025 belum memenuhi standar dikarenakan Kabupaten Maluku Tengah belum dapat memenuhi seluruh indikator evaluasi SPBE (evaluasi menggunakan regulasi berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 dimana evaluasi dibagi menjadi 4 domain, 9 aspek dan 47 indikator); Belum tersedianya SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan audit SPBE di Pemkab Maluku Tengah, Dokumen arsitektur proses bisnis masih dalam proses penyusunan saat dilakukan audit SPBE.
2. Hasil pengukuran capaian rata-rata sasaran strategis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebesar 92,95% (Sangat Baik), masuk kategori berhasil dengan capaian rata rata telah melampaui target yang ditetapkan.
3. Pencapaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Penyelenggaraan Informasi dan komunikasi publik serta keamanan informasi dan komunikasi daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Indikator Sasaran : 1) Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota” diampu oleh Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian kinerja terhadap target sebesar 122,34 %. (sangat memuaskan). 2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan capaian kinerja terhadap target indikator

sebesar 94,12. (sangat Baik). 3) Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Perangkat daerah dengan capaian kinerja terhadap target indikator sebesar 33,34% (Sangat Rendah) yang diampuh bidang Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi masuk kategori kurang berhasil karena tidak tercapai target. Skor Indeks KAMI perlu ditingkatkan dengan konsultasi, bimbingan dan pendampingan dari Diskominfo Prov Maluku dan BSSN RI. Beberapa indicator masuk kategori berhasil, meskipun ada indikator berada dibawah target, tetapi hal ini tetap menjadi perhatian lebih.

4. Pencapaian sasaran strategis 2 “Terwujudnya Kinerja Diskominfo yang profesional dan akuntabel” diampu oleh Sekretariat, capaian kinerja terhadap target dengan indikator kinerja Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo Kab. Maluku Tengah pada tahun 2024 sebesar 78,85% (baik).
5. Efisiensi dalam penggunaan anggaran tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp. 176.671.115,- atau 3,59% yang diperoleh dari persentase realisasi anggaran dibandingkan dengan alokasi anggaran yang dikelola.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka mendukung tercapainya program/kegiatan yang telah digariskan dalam PJMD, khususnya untuk mewujudkan capaian pada tahun 2025, maka Langkah-langkah yang diambil sebagai solusi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kegiatan yang bisa mendukung tercapainya RPJMD.
2. Berusaha mengedepankan pelayanan dalam bidang informasi publik melalui berbagai media dan sarana komunikasi yang ada
3. Mengoptimalkan SDM yang ada, serta memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis.
4. Mengidentifikasi dan melengkapi kebutuhan dalam pemenuhan kelengkapan 47 indikator dalam evaluasi SPBE sesuai PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020, serta menentukan penanggung jawab dari masing-masing indikator dalam SPBE.
5. Menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan SPBE dan kebijakan pembangunan Malteng Smart City.
6. Selalu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan dinas/ instansi terkait untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Maluku Tengah guna mewujudkan e-government

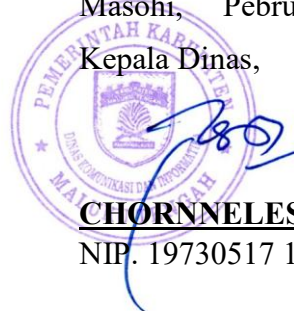
7. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan ke PPID Pelaksana maupun PPID Desa terkait penyusunan DIP dan DIK serta penyampaian informasi berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat di website dan media sosial.
8. Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi terkait time schedule dan peran masing-masing instansi guna memperlancar pelaksanaan kegiatan perluasan ketersediaan dan updating data.
9. Pengembangan dan updating data pada portal satu data maltengkab.go.id/ dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Maluku Tengah.
10. Melakukan integrasi antar sistem elektronik untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia yaitu interoperabilitas data.
11. Melaksanakan penyusunan metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator statistik sektoral secara bertahap.
12. Pelaksanaan audit sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah oleh auditor yang bersertifikasi BSSN secara bertahap.
13. Desk dan pendampingan self asesment Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Pemda oleh BSSN.
14. Meningkatkan IT asesment, penetration test (Pentest) dan implementasi sertifikat elektronik.

Berdasarkan Hasil Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah Pada Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan diatas diharapkan dapat menggambarkan pencapaian tujuan dan sasaran dinas dalam **“Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun dan Berkeadilan”**

Berbagai kendala dan masalah yang dihadapi menjadi tolak ukur dalam pengambilan kebijakan untuk tahun mendatang.

Masohi, Pebruari 2026

Kepala Dinas,



CHORNNELES SOPARUE, S.Pi.M.Si.

NIP. 19730517 199903 1 008